

No. 150 Juli - Agustus 2018

BaKTI**News** www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

- **MENJALIN ASA DI UJUNG BARAT
KABUPATEN LANDAK**
- **KERJASAMA LINTAS SEKTOR
UNTUK ASMAT BEBAS GIZI BURUK**
- **KOMUNIKASI :
BUKAN SEKEDAR MEMBERI INFORMASI**
- **MENGINTIP KOTA-KOTA
GUDANG SAMPAH DI INDONESIA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI News

Juli - Agustus 2018

No. 150

- 1** Menjalin Asa di Ujung Barat Kabupaten Landak
Oleh **NOFI ARIYANTO**
- 4** TNP2K dan Kemdikbud Serah Terima Rintisan KIIAT Guru Kepada Pemerintah Daerah
Oleh **SHARON KANTHY**
- 7** Kerjasama Lintas Sektor untuk Asmat Bebas Gizi Buruk
Oleh **N.J. TANGKEPAYUNG**
- 11** Komunikasi : Bukan Sekedar Memberi Informasi
Oleh **SYAIFULLAH**
- 15** Hidup Lebih Sehat di Lorong Sehat Makassar
Oleh **IKRAM**
- 19** Tukar Pengalaman 3 Kabupaten MELAYANI di Kubu Raya
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 23** Dongeng Keliling Mendorong Cinta Pustaka di Makassar
Oleh **TULUS WULAN JUNI**
- 27** Gerakan Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 31** Layanan Pendidikan bagi Anak Rentan dan yang Berkonflik dengan Hukum
Oleh **ARAFAH**
- 35** Mengintip Kota-kota Gudang Sampah di Indonesia
Oleh **IRMA GARNESIA**
- 39** Update Batukarinfo
- 40** Infografik
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Kota Tiom dari ketinggian Ibu Kota Kabupaten Lanny Jaya, Papua
(Foto: N.J. Tangkepayung/Yayasan BaKTI)



Menjalin Asa di Ujung Barat Kabupaten Landak

Oleh **NOFI ARIYANTO**

“

Sekarang sudah tidak ada lagi kemangkiran guru. Guru-guru lebih bertanggung jawab dalam memberi pelayanan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Saya berharap Program KIAT Guru terus berlanjut.

Natalia

Guru PNS dari SDN 03 Tempoak

SDN 03 Tempoak terletak di Dusun Ohak Desa Tempoak Kecamatan Menjalin yang letaknya secara geografis paling ujung barat Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Ada tiga Sekolah Dasar di Tempoak yaitu SDN 03 Tempoak, SDN 15 Betung Tanjung dan SDN 20 Cagat. Desa Tempoak berbatasan langsung dengan Kabupaten Mempawah dan menjadi salah satu sasaran Program Rintisan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru). Sebuah program kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk meningkatkan layanan pendidikan di daerah terpencil.



Foto: Dhila Mansyur/Yayasan BaKTI

Setelah berjalannya Program KIAT Guru di SD ini, beberapa prestasi berhasil diraih, di antaranya menjuarai Lomba Membaca yakni Juara Pertama, Kedua, dan Ketiga serta Juara Harapan Satu dan Dua yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada acara Bulan Bhakti Gotong Royong Kabupaten Landak (BBGRM) ke-14 yang diikuti oleh tiga sekolah di Desa Tempoak Kecamatan Menjalin.

Pada akhir April lalu SDN 03 Tempoak kembali mengikuti Lomba Bercerita tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-kabupaten Landak yang diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Karanganyar yang diikuti 15 peserta yang mewakili tiga kecamatan di wilayah tersebut yaitu Kecamatan Mandor, Kecamatan

Mempawah Hulu, dan Kecamatan Menjalin. Perwakilan SDN 03 Tempoak sendiri merupakan satu-satunya peserta dari desa terpencil yang bersaing dengan beberapa sekolah yang terletak di kota kecamatan. “Semoga SDN 03 Tempoak bisa menjadi juara dan menunjukkan kalau Sekolah Dasar di Daerah Terpencil juga bisa bersaing dan tidak kalah dari Sekolah Dasar yang ada di perkotaan,”ungkap para pemangku kepentingan di Desa Tempoak.

Komitmen Keberlanjutan Pemangku Kepentingan

Prestasi yang nyata itu sebelumnya tidak pernah diraih oleh SDN 03 Tempoak. Dengan prestasi baru tersebut rupanya berdampak pada peningkatan semangat dan komitmen para pemangku kepentingan dan masyarakat Tempoak untuk melanjutkan Program ini walau tanpa kehadiran dan pendampingan dari Tim Pelaksana Daerah KIAT Guru.

“Saya siap melanjutkan program ini karena dengan munculnya program ini, sekolah yang ada di desa saya tidak kalah dengan SD yang ada di Kota Kecamatan”, ucap Sunardi Kader Desa SDN 03 Tempoak. Senada dengan itu, Kepala Sekolah SDN 03 Tempoak, Epi Pina Edita, S.Pd mengakui bahwa kehadiran KIAT Guru telah membantunya sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan kesadaran guru-guru akan peran dan fungsinya sebagai pendidik dan bertanggungjawab atas tugas utamanya. “Guru semakin disiplin terutama di jam datang dan pulang. Juga administrasi guru menjadi lebih baik terutama dalam persiapan kegiatan belajar dan mengajar, bahkan siswapun mendapatkan waktu belajar di sekolah dengan semestinya,” akunya. Jika semua Sekolah mendapatkan Program KIAT Guru, Epi Pina yakin bahwa pendidikan di semua daerah akan maju.

Perubahan pada guru dan prestasi yang diraih siswa SDN 03 Tempoak memberikan kebanggaan juga kepada Kepala Desa Tempoak. Pada sebuah kesempatan di pelatihan tata kelola Maret lalu, Kepala Desa Tempoak, Damianus menyampaikan rasa bangganya, “Dengan adanya Program KIAT Guru, SDN 03 Tempoak mempunyai prestasi yang nyata di tingkat Desa hingga Kecamatan, sehingga nama desa kami pun ikut dikenal di bidang pendidikan”. Atas prestasi itu, Kepala Desa siap mengawal keberlanjutan KIAT Guru dengan mengalokasikan anggaran operasional dari Dana Desa. “Walaupun Fasilitator Masyarakat sudah tidak bertugas lagi di sini, kami selaku Pemerintah Desa siap melanjutkan praktik-praktik baik dari



Foto : Dhia Mansyur/ Yayasan BaKTI

program ini dan memberikan dukungan sepenuhnya termasuk anggaran,” ujarnya.

Sekarang ini SDN 03 Tempoak menjadi SD Percontohan di Desa Tempoak. Mantan Kepala Sekolah SDN 03 Tempoak, Pak Sarinus Kabire yang kini menjadi Pengawas SD di Kecamatan Mempawah Hulu menceritakan betapa sebelumnya orang tua siswa dari Dusun Ohak dan Dusun Tareng lebih memilih menyekolahkan anaknya di SDN 20 Cagat Dusun Cagat, biarpun jauh dari rumahnya. Namun sekarang orang tua siswa yang berada di Dusun Ohak dan Dusun Tareng sudah percaya dengan Keberadaan SD tersebut. “Jadi sangat sayang kalau program ini tidak berlanjut karena dampaknya sangat besar terhadap peningkatan kualitas sekolah khususnya sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil,” terang Pak Sarinus.

Salah seorang Pengawas SD lainnya di Kecamatan Menjalin, Pak Hamdanyah, yang sering mengikuti perkembangan sekolah dampingan KIAM Guru bahkan menegaskan akan memberikan sanksi bagi guru-guru yang tidak

mau bekerjasama. Penegasannya itu disampaikan pada Pertemuan Rutin Bulanan (PRB) yang diikuti Dewan Guru, Kelompok Pengguna Layanan, Kader desa serta orang tua murid SDN 03 Tempoak.

Menurutnya KIAM Guru telah membantu pekerjaannya sebagai Pengawas, dan sekolah-sekolah dampingan KIAM Guru sangat jauh perubahannya bila dibandingkan sebelumnya, maka dia akan marah bila ada guru-guru yang tidak mengikuti kesepakatan janji layanan yang dibuat bersama masyarakat. “Oleh karena itu, jika ada guru-guru yang keberatan kinerjanya turut dinilai oleh masyarakat pengguna layanan, harap untuk melaporkan ke saya. Guru-guru tersebut akan saya beri peringatan – bahkan kalau perlu, dapat saya rekomendasikan untuk mutasi,” tegasnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Rintisan KIAM Guru, hubungi info@bakti.or.id

TNP2K dan Kemdikbud Serah Terima Rintisan KIAT Guru Kepada Pemerintah Daerah

Oleh **SHARON KANTHY**

“Setelah Juni 2018, Kemdikbud dan TNP2K tidak akan langsung meninggalkan Kabupaten peserta rintisan KIAT Guru. Kami masih akan memantau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan keberlanjutan kegiatan hingga Desember 2018. Pada akhir tahun nanti, Pemerintah Pusat dengan mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten Rintisan berencana untuk menyusun bahan pengimbasan kegiatan rintisan ke sekolah-sekolah lain di desa sangat tertinggal. Kami berharap, Pemda juga bisa terus melanjutkan penilaian layanan guru di tahun 2019.

Pernyataan di atas disampaikan oleh Temu Ismail, Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Nasional Program Kinerja dan

Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) dalam mengantar berakhirnya rintisan setelah lebih dari setahun berjalannya program. Sesuai dengan arahan Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Hamid Muhammad, sebagai Ketua Tim Pengarah KIAT Guru, program ini akan berakhir pada bulan Juni 2018. Kemdikbud-GTK, TNP2K dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Sintang, Landak, Manggarai Barat dan



Ketua Tim Pelaksana KIAT Guru, Temu Ismail, bersama dengan *Lead Program Manager* TNP2K-KIAT Guru, Caroline Tupamahu, membuka kegiatan lokakarya serah terima regional program rintisan KIAT Guru tahun 2018. Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Manggarai Timur pun berkumpul untuk melaksanakan Lokakarya Refleksi untuk membahas langkah-langkah keberlanjutan Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru tahun 2018. Lokakarya yang bersifat partisipatoris ini dilakukan secara bertahap: 3-5 Mei 2018 di Pontianak untuk kabupaten peserta dari provinsi Kalimantan Barat dan 7-9 Mei 2018 di Bali untuk kabupaten peserta dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan Kemdikbud-GTK, TNP2K, Yayasan BaKTI beserta Tim Koordinasi Daerah (TKD) lima kabupaten rintisan KIAT Guru yang terdiri dari Ketua Tim Koordinasi Daerah dan anggota dari Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa, dan Inspektorat Daerah.

Dalam paparan awal Lokakarya Refleksi, disampaikan laporan hasil pelaksanaan rintisan sejak Oktober 2016 sampai dengan April 2018. Menggunakan pendekatan kebijakan berbasis penelitian, program rintisan KIAT Guru mengkombinasikan pemberdayaan masyarakat dengan pembayaran tunjangan khusus yang dikaitkan dengan kehadiran atau kualitas layanan guru. Temuan sementara mengindikasikan adanya peningkatan kehadiran dan kualitas layanan guru. Perubahan ini beriringan dengan perbaikan kehadiran peserta didik maupun kemampuan dasar literasi dan numerasi murid di 203 SD rintisan KIAT Guru. Mekanisme pembayaran tunjangan yang dikaitkan dengan penilaian layanan guru pun menghasilkan penghematan anggaran tunjangan khusus hingga tujuh persen. Penilaian masyarakat terhadap tingkat kehadiran dan kualitas layanan guru pun meningkat.

Juga dilaporkan, dalam mempersiapkan keberlanjutan secara mandiri di lima kabupaten rintisan dari Juli hingga akhir 2018, Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru telah menjalankan beberapa langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara lima Pemerintah Kabupaten Rintisan KIAT Guru dengan Kemdikbud dan TNP2K tentang Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2018. Sebagai tindak-lanjutnya, Tim Koordinasi Daerah (TKD) di lima kabupaten rintisan menerbitkan: Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru tahun 2018, Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Tim Koordinasi Daerah Program Rintisan KIAT Guru, dan SK Bupati tentang Sekolah dan Guru Peserta Program Rintisan KIAT Guru tahun 2018. Berbagai jenis regulasi tingkat nasional maupun daerah tersebut bertujuan untuk memastikan agar keberlanjutan



Saya berharap Pemerintah Pusat dapat menerapkan mekanisme KIAT Guru di semua provinsi di Indonesia guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui anak didik kita.

Rofinus Mbon

Sekretaris Daerah Manggarai Barat

pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru paska bulan Juni tahun 2018 oleh organisasi pelaksana di tingkat kabupaten sampai dengan sekolah dan desa dapat berjalan dengan baik, objektif dan tepat sasaran.

Di samping itu, Lokakarya Refleksi juga mengidentifikasi poin-poin pembelajaran. Pertama, payung regulasi program KIAT Guru perlu disosialisasikan. Kedua, pelaksanaan penilaian layanan guru perlu melibatkan secara aktif Kader, Kelompok Pengguna Layanan (KPL), Pemerintah Desa, Sekolah, Pengawas dan Tim Koordinasi Daerah. Ketiga, instrumen penilaian layanan guru juga diharapkan dimonitor penggunaannya. Keempat, pembayaran tunjangan khusus berbasis nilai layanan guru perlu tepat waktu. Pengaduan dari masyarakat perlu ditangani oleh Tim Koordinasi Daerah di 5 kabupaten. Petikan pembelajaran ini akan dijadikan pegangan pokok pemangku kepentingan daerah dalam merencanakan kegiatan KIAT Guru secara mandiri.

Tim Koordinasi Daerah pun merumuskan rencana kerja keberlanjutan rintisan pasca Juni 2018 setelah diserahterimakan pada kegiatan lokakarya. Adapun beberapa poin kegiatan tindak lanjut oleh TKD di tingkat desa/sekolah adalah (1) Pemerintah Desa terlibat dalam menganggarkan, menyelenggarakan, memantau dan menghadiri pertemuan penilaian layanan, (2) Kader, KPL, Sekolah, Pemerintah Desa dan Pengawas melakukan penilaian layanan yang adil dan objektif, (3) Kepala Sekolah melaporkan hasil penilaian layanan kepada Dinas Pendidikan secara tepat waktu, (4) Kader dan KPL melaporkan penggunaan anggaran desa secara transparan kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat dan (5) Kader Desa melakukan evaluasi janji layanan bersama KPL, Sekolah, dan Pemerintah Desa secara berkala.

Pada tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Daerah berencana untuk menyelenggarakan



Diskusi Kelompok Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Sintang untuk merumuskan rencana kerja keberlanjutan KIAT Guru secara mandiri ditahun 2018. Foto: Dok. Yayasan BaKTI

serangkaian aktivitas sebagai berikut: (1) mensosialisasikan peraturan KIAT Guru yang sudah diterbitkan kepada pelaksana rintisan di tingkat kabupaten hingga desa/sekolah, (2) melakukan pengawasan kegiatan di desa/sekolah secara berkala, (3) memastikan instrumen penilaian yang telah diserahkan oleh KIAT Guru, termasuk di antaranya adalah KIAT Kamera, digunakan dengan baik oleh desa/sekolah, (4) memastikan penilaian dan pelaporan layanan serta pembayaran tunjangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan (5) menindaklanjuti pengaduan terkait penilaian, pelaporan dan evaluasi janji layanan dari pelaksana kegiatan di tingkat desa.

Dalam mendukung Pemda untuk mengeksekusi rencana kerja di atas, TNP2K dan Kemdikbud memperpanjang pendampingan teknis khusus di tingkat kabupaten hingga Desember khususnya guna memfasilitasi kesiapan lima kabupaten untuk melanjutkan kegiatan pasca tahun 2018. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penempatan dua personel TNP2K di setiap kabupaten untuk mendukung pemantauan proses pelaksanaan penilaian di tingkat desa dan pembayaran berbasis layanan di tingkat kabupaten. Di akhir tahun ini, temuan lengkap maupun refleksi dari lima kabupaten terkait pelaksanaan rintisan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 akan dirumuskan dalam bentuk

rekomendasi untuk kebijakan di tingkat nasional.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Aspansius, menekankan bahwa “Masalah pendidikan tidak bisa diatasi oleh satu OPD (Organisasi Pelaksana Daerah) saja. Kehadiran KIAT Guru menyatukan semua elemen pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa, Bappeda dan OPD lainnya untuk bersinergi dalam menjalankan layanan pendidikan dengan baik.”

“Program KIAT Guru harus diteruskan dan tidak terbatas di lima kabupaten tetapi untuk seluruh kabupaten di Indonesia dimana sekolah-sekolah yang memiliki tantangan serupa dengan SD rintisan berada. Sehingga saya berharap Pemerintah Pusat dapat menerapkan mekanisme KIAT Guru di semua provinsi di Indonesia guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui anak didik kita,” pesan Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Rofinus Mbon, pada akhir kegiatan lokakarya refleksi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Rintisan KIAT Guru, hubungi info@bakti.or.id



Foto: N.J. Tangkepung/ Yayasan BaKTI

Kerjasama Lintas Sektor untuk Asmat Bebas Gizi Buruk

Oleh **N.J. TANGKEPAYUNG**

Sekitar 130 orang memenuhi Gedung Ja Asa manam Apcamar di Kota Agats yang datang mewakili Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh perempuan. Selama dua hari 19-20 Maret 2018, Pemerintah Kabupaten Asmat bekerja sama dengan Program KOMPAK - LANDASAN II mengadakan Semiloka Pengembangan Strategi Pencegahan Gizi Buruk Yang Terintegrasi di Kabupaten Asmat.

Kegiatan semiloka ini dibuka oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos dan Perwakilan

Kedutaan Besar Australia, Michelle Lowe. Bupati Asmat sekaligus sebagai pemateri di hari pertama. Selain Bupati Asmat juga hadir Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto H. M.Pd, Antropolog senior UNCEN Prof. Dr. Johzs R. Mansoben, Rektor UNCEN Prof. Dr. Apolo Sapanfo, ST, MT yang adalah putra asli Asmat dan Uskup Asmat Mgr. Aloysius Murwoto, OFM yang berbagi pengetahuan dan pengalaman serta perspektif tentang Asmat dari berbagai sudut pandang.

Kabupaten Asmat adalah bagian dari Kabupaten Merauke yang dimekarkan



berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Saat ini Kabupaten Asmat terdiri dari 23 distrik dengan 139 kampung yang hampir seluruhnya berada di atas rawa-rawa Pesisir Selatan Papua. Sebagian besar infrastruktur di Agats ibukota Asmat sejak dahulu terbuat dari kayu, namun belakangan ini pemerintah mulai mengganti kayu dengan beton kuat terutama untuk konstruksi jalan, jembatan utama dan pelabuhan laut.

Tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta atau Jayapura menuju Agats ibu kota Kabupaten Asmat. Perlu transit di Timika atau Merauke kemudian terbang selama 45 menit ke Ewer di mana *air-strip* berada dengan menggunakan pesawat yang lebih kecil, biasanya jenis *Twin Otter* atau *Grand Caravan* (berpenumpang 9-14 orang dan dapat mendarat di landasan pendek). Sampai di Bandar udara Ewer perjalanan dilanjutkan dengan speedboat berpenumpang 4-6 orang selama kurang lebih 10 menit menuju Pelabuhan Agats.

Seperti diketahui bersama bahwa pada awal Januari 2018 Kementerian Kesehatan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Asmat. Kampung As dan Atat paling mendapat perhatian karena banyaknya korban meninggal yaitu 31 jiwa dari total 72 korban meninggal.

Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari tetapi dihadapi dengan kemampuan mengelola secara baik dan benar.

Terdapat 66 orang meninggal karena penyakit Campak dan 6 orang anak meninggal karena gizi buruk (sumber: Hasil Investigasi Tempo).

Bupati Asmat mengatakan bahwa pembangunan di Asmat tidak semudah pembangunan di daerah lain, kondisi geografis menuntut kerja keras dan harus pintar. Bupati menekankan pentingnya memahami budaya Asmat sebagai dasar pembangunan dan memiliki visi terwujudnya masyarakat Asmat yang maju dan sejahtera serta bermartabat. Lebih lanjut Bupati mengatakan “Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai kalangan mengenai persoalan gizi buruk ini, dan sebagai pimpinan saya menerima kritikan dan masukan dari

berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan penanganan Kejadian Luar Biasa Campak dan gizi buruk ini, saya percaya setiap masukan dari berbagai pihak memiliki maksud yang baik” menutup sambutannya.

Mewakili Kedutaan Besar Australia, Michelle Lowe (*Councillor* Bidang Pembangunan Manusia) menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya beserta rombongan saat menginjakkan kaki di Asmat. “Ini pertamakalinya saya datang ke sini, Asmat memiliki sungai-sungai yang cantik, namun dalam kecantikannya banyak sekali tantangan-tantangan, Pemerintah Australia telah lama bekerjasama membangun Papua baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan yang meliputi HIV dan AIDS, program penyelamatan ibu dan anak, serta program beasiswa pendidikan”.

Pemerintah Australia memiliki program kerjasama dengan Pemerintah Indonesia yang disebut KOMPAK (Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia), yang secara langsung membawahi Program LANDASAN II di Papua dan Papua Barat. Hasil diskusi Pemerintah Australia dengan Pemerintah Provinsi Papua, meminta untuk memasukan Kabupaten Asmat sebagai salah satu penerima bantuan dalam Program KOMPAK-LANDASAN II. “Kami menyambut baik permintaan dari Pemerintah Provinsi Papua, dan merasa ini adalah keputusan yang tepat. Karena tantangan pembangunan di Kabupaten Asmat cukup banyak, namun di sisi lain kami merasa mendapatkan dukungan karena Bapak Bupati Asmat dengan jajarannya memiliki keinginan yang sama untuk membangun Asmat.”

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Program KOMPAK-LANDASAN II pada tanggal 20 Maret genap setahun bekerja di Distrik Agats, dan telah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. “Hal ini dapat dilihat dari adanya penguatan pada sistem administrasi pemerintahan kampung, penguatan pada kader kampung (desa), penguatan manajemen sekolah, dan saya telah meninjau sekolah SD Inpres Syuru dan saya sangat terkesan dengan kemajuan yang dicapai.” Menutup sambutannya atas nama Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Michelle Lowe minta melalui lokakarya ini dapat menjadi titik awal dalam menentukan arah penanganan persoalan penanganan gizi buruk di kampung-kampung Asmat.

Setelah berlangsung selama dua hari, lokakarya menghasilkan beberapa rekomendasi dan rumusan strategi kerjasama untuk pencegahan gizi buruk yang terintegrasi di

APA YANG DI

PENDIDIKAN



Mendukung program Pemerintah Kabupaten Asmat di Bidang Pendidikan Dasar melalui dua kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas tata-kelola pendidikan dasar, yaitu Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) “Papua Pu Pendidikan di Kabupaten Asmat,” dan Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) “Papua Pu MBS.” Tercatat 76 peserta pelatihan dan pendampingan bidang tata-kelola pendidikan dasar, dengan 59 laki-laki dan 17 perempuan penerima manfaat langsung.

PENCEGAHAN H



Dimulai dengan melatih 24 kader dan koordinator Distrik Agats agar mampu dalam kampanye pencegahan seroprevalensi HIV/AIDS yang dimulai dari kampung dilatih untuk menjadi motivator “Jomblo Bebas AIDS” (slogan kampanye HIV & AIDS) itu juga diadakan pelatihan dan sosialisasi kepada Tokoh Adat, OPD dan Pemangku Masyarakat untuk memperkuat komitmen penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Asmat. Sejumlah 59 orang penerima manfaat langsung laki dan 9 perempuan.

Kabupaten Asmat. Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya nota kerjasama kesepahaman antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, yang ditandatangani oleh Donatus Tamot, S.Pd, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan dr. Pieter Pajala, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat. Nota kesepahaman ini mengatur kerjasama dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Sekolah Dasar dampingan Program KOMPAK-LANDASAN II di Distrik Agats, Akat dan Atsj Kabupaten Asmat. Tujuannya untuk membangun sinergitas program antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan

KERJAKAN KOMPAK-LANDASAN II di Asmat

KESEHATAN



Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan telah mengadakan rangkaian pelatihan dan pendampingan di Kabupaten Asmat, diantaranya Pelatihan penyusunan SOP Non-Teknis AKI/AKB dan Malaria, Pelatihan Pendamping penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) terpadu Provinsi Papua, dan Pelatihan juga Pendampingan Penyusunan RUK dan RPK Puskesmas Agats. Total penerima manfaat langsung dibidang kesehatan adalah 138 orang dengan perincian 56 orang laki-laki dan 82 orang perempuan.

COMMUNITY DEVELOPMENT



Meningkatkan tata-kelola pemerintahan kampung yang mandiri dan transparan, dimulai dengan pelatihan kader-kader kampung yang berasal dan dipilih oleh kampung sendiri, pelatihan Sistem Administrasi Informasi Kampung (SAIK) bagi kader kampung, Pelatihan penyusunan RPJMK-Penganggaran Kampung serta Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), serta mekanisme pengaduan dan pelaporan masyarakat kampung. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung telah melatih dan mendampingi 152 orang kader kampung, kepala kampung, aparat distrik, BAMUSKAM, tokoh adat, tokoh adat dan tokoh perempuan di Asmat yang terdiri atas 142 laki-laki dan 10 perempuan.

HIV/AIDS

dari 12 kampung dan seorang memiliki pengetahuan terlibat ta penanggulangan HIV dan ng. Kader-kader kampung aga Pintu Rumah dari HIV & AIDS LANDASAN II). Selain Lokakarya Tokoh Agama, Kepentingan dalam rangka HIV dan AIDS di Kabupaten dibidang ini dengan 50 laki-



BERSAMA TOKOH ADAT/AGAMA

Bekerjasama sangat erat dengan tokoh agama dan tokoh adat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah (kabupaten, distrik dan kampung) dan pemberdayaan masyarakat kampung. Pastor dan Keuskupan Asmat terlibat dalam persiapan, diskusi-diskusi, serta menjadi fasilitator dalam kegiatan-kegiatan Program KOMPAK-LANDASAN II. Hal ini sangat memudahkan penerimaan masyarakat karena Pastor-Pastor sangat dipercaya oleh masyarakat dan memiliki dedikasi yang kuat dalam membangun Asmat. Selain itu, pendekatan kepada kepala-kepala adat dan memahami budaya lokal juga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kegiatan Program KOMPAK-LANDASAN II.

dalam meningkatkan kualitas peserta didik melalui institusi pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar sehingga sekolah dapat menjadi "Health Promoting School". Melalui kerjasama lintas sektor ini, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi murid-murid dalam upaya membentuk generasi Kabupaten Asmat yang berkualitas.

Sebelum lokakarya ditutup diadakan serah-terima dokumen hasil dan rekomendasi lokakarya, yang diserahkan oleh Unit Manager Human Development Kedutaan Besar Australia, Astrid Kartika yang didampingi oleh Team Leader

Program KOMPAK-LANDASAN II, Don K. Marut, *Implementation Manager* Program KOMPAK-LANDASAN II, George Corputty dan Manager KOMPAK Provinsi Papua & Papua Barat, Hilda Eveline kepada Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos. Lokakarya ditutup secara resmi oleh Bupati dengan memukul tifa.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN II, hubungi info@bakti.or.id

Komunikasi : Bukan Sekedar Memberi Informasi

Oleh **SYAIFULLAH**

Ada banyak program yang gagal mencapai tujuannya karena para komunikatornya gagal memahami tujuan dari program tersebut.

“ Baru kali ini saya ikut ToT dan saya tidak mengantuk,” kata Andry SIP, MSi, Kepala Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdalisbang)

Provinsi Papua, sekaligus juga Ketua Sekretariat Bersama BANGGA Papua. “Biasanya kalau ada ToT saya hanya hadir di awal. Tapi kali ini saya sengaja ikut sampai selesai,” sambungnya lagi.

Kalimat itu diutarakannya sesaat ketika menutup pelatihan *Training of Trainer (ToT)* yang digelar Selasa dan Rabu (27-28 Maret 2018) di Jayapura. Andry bersama beberapa anggota Sekber BANGGA Papua lainnya begitu bersemangat untuk hadir dalam acara ToT tersebut meski sebenarnya tanggal 28 Maret sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Papua sebagai cuti bersama menjelang hari Paskah.

Tanggung jawab yang besar sebagai anggota Sekber BANGGA Papua, serta pemaparan materi yang menarik adalah dua hal yang membuat para anggota Sekber begitu bersemangat untuk hadir dalam acara tersebut.

Pelatihan di Jayapura ini diampu oleh Feby Siahaan, seorang jurnalis senior yang adalah juga dosen jurnalistik di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), penulis buku, *trainer* media dan komunikasi dan mentor sekolah jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalis Independen).



Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif merupakan fokus ToT dalam dua hari ini. Komunikasi persuasif bertujuan untuk memengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang agar sesuai dengan harapan pemberi informasi atau komunikator.

Di hari pertama, Feby memberikan banyak sekali pengetahuan baru kepada para peserta, khususnya bagaimana mempraktikkan komunikasi persuasif.

“Komunikasi persuasif ini sangat berbeda dengan komunikasi yang biasa,” kata Feby, memulai presentasinya.

Menurutnya, ada lima tingkat tujuan komunikasi yaitu memberi informasi, memberi pemahaman, menciptakan impresi, memengaruhi/menggerakkan dan menciptakan hubungan. Komunikasi persuasif bertujuan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu.

Menurutnya, tujuan komunikasi yang paling rendah adalah: *“you inform me”* atau sekedar membuat orang tahu. Komunikasi pada tingkat ini hanya memberi tahu tanpa memberikan informasi secara lebih mendalam.

Tujuan komunikasi di atasnya adalah *“you make me understand.”* Di tingkat ini, pemberi informasi berhasil membuat audiens menjadi paham tentang apa yang disampaikan, bahkan sampai ke bagian detail sekalipun.

Lalu, tingkat selanjutnya adalah *“you impress me.”* Ini adalah tingkat ketika si pemberi informasi berhasil membuat audiens menjadi terkesan dengan pesan yang disampaikan dan cara penyampaiannya.

Tingkat selanjutnya adalah *“you move me,”* atau “Anda membuat saya bertindak,” yaitu ketika si penyampai pesan mampu memengaruhi atau menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu. Komunikasi persuasif harus sampai pada tujuan ini.

Dan tingkat tertinggi adalah *“you engage me,”* atau “Anda membuat saya terikat”. Di tingkat ini, audiens akan merasa kehilangan ketika si pemberi informasi tidak lagi bersama mereka. Ibaratnya, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemberi informasi sudah masuk ke alam bawah sadar mereka dan bahkan mereka sudah merasakan keterikatan dengan si pemberi informasi.

Sayangnya, sosialisasi program, menurut Feby, seringkali hanya sampai pada tahap memberi informasi atau membuat orang tahu saja. Seharusnya, sosialisasi program harus bertujuan membuat orang paham, misalnya tentang alasan dibuatnya program tersebut, bahkan harus mampu memengaruhi pola pikir orang agar mau berubah.

Namun demikian, untuk melakukan komunikasi persuasif, setiap program harus memiliki tujuan yang jelas. Terlebih lagi, komunikator atau orang yang melakukan sosialisasi, harus memahami tujuan program tersebut secara baik.

“Ada banyak program yang gagal mencapai tujuannya karena para komunikatornya gagal memahami tujuan dari program tersebut,” kata Feby.

Memahami tujuan program adalah modal awal untuk menyusun pesan utama untuk disampaikan. Cara mengemas pesan itu pun harus disesuaikan dengan audiens atau penerima pesan, misalnya, dengan memahami konteks sosial budaya audiens. Dengan demikian, pesan akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh audiens sasaran.

Lalu, bagaimana caranya melakukan komunikasi persuasif?

Feby mengemukakan, agar dapat melakukan komunikasi persuasif, komunikator harus menguasai lima hal penting, yaitu: keyakinan bahwa yang disampaikan adalah sesuatu yang baik dan benar; melakukan priming atau menekankan pesan penting dengan cara mengulang-ulang pesan tersebut; berkomunikasi dengan menggunakan konteks sosial budaya; menggunakan visual dan audio visual, dan mampu memberikan alasan, contoh atau bukti (argumentasi).

Hal paling utama adalah pemberi informasi harus yakin dan percaya dulu pada hal yang akan disampaikan. Seseorang tidak mungkin bisa meyakinkan orang lain apabila dia sendiri tidak yakin pada hal yang disampaikan.

Keyakinan seseorang pada pesan yang dibawakannya bisa terlihat dari bahasa tubuh ketika ia menyampaikan pesan tersebut. Ketika ia yakin, maka bahasa tubuhnya otomatis ikut bicara, misalnya, suaranya menjadi lebih lambat, intonasinya menjadi lebih kuat, ekspresinya menjadi lebih serius dan sebagainya. Hal ini penting karena menurut penelitian, 55% keberhasilan menyampaikan pesan ditentukan oleh bahasa tubuh dan mimik wajah, 38% keberhasilan ditentukan oleh intonasi suara dan hanya 7% oleh kemampuan menyusun kata-kata. Artinya, bila kita menyampaikan pesan, bahkan dengan kata-kata yang baik, namun tidak menggunakan bahasa tubuh secara tepat, maka keberhasilan penyampaian pesan tersebut hanya 7%.

Pada sesi ini, peserta dilatih tentang bagaimana berkomunikasi dengan memanfaatkan bahasa tubuh, mimik wajah dan intonasi suara.



Selain itu ada juga teori tentang priming yang diberikan kepada peserta. Priming adalah sebuah cara untuk memengaruhi alam bawah sadar penerima informasi dengan cara mengulang-ulang sebuah pesan penting. Pengulangan pesan dengan penekanan atau intonasi khusus mampu membuat pesan tersebut masuk ke alam bawah sadar penerima pesan. Akibatnya, tanpa sadar, si penerima pesan akan berpikir dan bersikap sesuai yang diinginkan oleh pemberi pesan.

Pemberi pesan juga harus memahami secara baik konteks sosial budaya penerima pesan. Pelajari cara mereka berkomunikasi dan kearifan lokal yang ada. Temukan kesamaan dengan mereka. Bicaralah dengan tempo, cara, intonasi bahkan bila memungkinkan, logat yang sama dengan mereka. Dengan cara ini, pemberi pesan akan lebih mudah berkomunikasi dengan penerima pesan.

Hal yang tidak kalah penting adalah penggunaan visual dan audio visual. Menurut penelitian, otak manusia lebih mudah menerima dan mengingat pesan dalam bentuk gambar, apalagi gambar berwarna. Karenanya, media visual menjadi pilihan terbaik untuk menyampaikan sebuah pesan.

Yang terakhir, pemberi pesan juga harus mampu memberikan contoh dan mengemukakan alasan kepada audiens.

Materi publikasi Program BANGGA Papua dibuat dengan mengadopsi semua teknis komunikasi ini, misalnya: mengutamakan gambar (visual) dan audio visual dibandingkan kata-kata, memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat pantai dan pegunungan di Papua serta pendekatan keagamaan dan adat.

Teknik Presentasi

Di hari kedua, pelatihan kembali dilanjutkan dengan topik “Teknik Presentasi.” Kali ini, para peserta dibekali kemampuan untuk melakukan presentasi secara efektif.

Di sesi pertama, Feby memulai dengan menekankan pentingnya membuka sebuah presentasi dengan cara yang tepat. Pembukaan presentasi harus dimulai dengan penyampaian pesan atau pernyataan yang langsung menarik perhatian audiens, layaknya sebuah film laga yang dimulai dengan adegan yang mendebarkan, sehingga penonton tertarik untuk terus menonton film tersebut. Bila presentasi dibuka dengan pesan atau pernyataan yang menarik, maka audiens



Foto: Syaifulah, Yayasan BaKTI

akan tersentak dan tertarik untuk terus mendengarkan pemaparan selanjutnya.

“Pembukaan presentasi idealnya hanya tiga menit. Lebih dari tiga menit, orang akan mulai ragu tentang apa yang Anda presentasikan,” kata Feby.

Berikutnya, hal penting lain yang ditekankan adalah sebuah presentasi hendaknya minim tulisan atau lebih banyak menggunakan gambar atau simbol. *Slide* presentasi hanyalah alat bantu, bukan sesuatu yang menjadi fokus utama dalam pemaparan. Si presenter, adalah fokus utama dalam sebuah presentasi. “Saya mau orang mendengarkan saya, bukan melihat *slide* presentasi saya,” demikian Feby.

Setelah mendengarkan pemaparan, setiap peserta diminta untuk mempraktikkan presentasi. Peserta diminta memilih beberapa topik yang disiapkan, mempersiapkan diri, lalu melakukan presentasi. Para peserta diharapkan bisa mempraktikkan teori yang didapatkan sejak hari pertama dan kedua ToT.

Selepas makan siang, sesi latihan presentasi dilanjutkan. Kali ini para peserta – khususnya dari Sekber provinsi dan Humas provinsi – diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang

BANGGA Papua, dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang sudah dibuat oleh tim komunikasi Yayasan BaKTI. Ada lembar balik, beberapa poster, dan *leaflet* yang menjadi alat bantu dalam presentasi tersebut.

Para peserta lain dikondisikan sebagai warga kampung yang menjadi target sasaran program BANGGA Papua. Sesi ini sekaligus sebagai simulasi ketika anggota Sekber turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan para penerima manfaat di daerah sasaran.

ToT ini dipadati oleh latihan-latihan atau praktik untuk peserta. Setiap kali pemaparan singkat tentang teori selesai diberikan, selalu ada latihan untuk mempraktikkan. Peserta bahkan diberi beberapa contoh kasus untuk menggalikan kemampuan mereka dalam mencoba teori-teori komunikasi persuasif yang telah disampaikan.

Selain anggota Sekber yang berjumlah delapan orang, ToT ini juga diikuti oleh dua staf Humas Pemprov Papua dan anggota tim komunikasi dari Yayasan BaKTI.

ToT di Tiga Kabupaten

ToT selama dua hari ini digelar oleh tim komunikasi Yayasan BaKTI yang mengemban tanggung jawab mempersiapkan strategi komunikasi, alat komunikasi dan meningkatkan kapasitas komunikasi anggota Sekber BANGGA Papua.

Terkait peningkatan kapasitas komunikasi, BaKTI akan melanjutkan ToT untuk Sekber kabupaten di tiga kabupaten *pilot project*, yaitu: Asmat, Lanny Jaya dan Paniai. Tujuan utamanya adalah membekali anggota tim Sekber kabupaten yang akan memberikan pelatihan komunikasi kepada kepala dan staf distrik, juga kepala dan staf kampung. Dengan demikian, ketika melakukan sosialisasi, mereka tidak lagi sekedar memberikan informasi, tetapi sudah mampu melakukan komunikasi persuasif.

ToT di Kabupaten Asmat dilakukan pada tanggal 3-6 April, Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 16-19 April dan ditutup dengan ToT di Paniai pada tanggal 23-26 April 2018.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua, hubungi info@bakti.or.id



Hidup Lebih Sehat di Lorong Sehat Makassar

Oleh I K R A M

Tahukah Anda, terdapat sekitar 7.500 lorong di Kota Makassar. Ini berarti sebagian besar warga kota bermukim di dalam lorong. Sayangnya hampir seluruh lorong di kota ini terkesan kumuh dengan kebiasaan hidup warga yang kurang sehat.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, termasuk melakukan identifikasi dan pendataan masalah kesehatan untuk meningkatkan intervensi cepat Puskesmas dalam menangani masalah kesehatan. Namun seringkali upaya pendataan ini mengalami kendala seperti adanya warga yang tidak ingin memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pendataan, warga yang sulit ditemui, dan padatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang menyebabkan waktu yang sangat terbatas bagi petugas untuk melakukan pendataan. Sulitnya melaksanakan pendataan tidak hanya menyebabkan kurangnya data dan informasi masalah kesehatan penduduk, namun juga membuat kegiatan sosialisasi perilaku hidup



Sumber foto : makassarbicara.com

Lorong Sehat (LongSet) adalah pembinaan kesadaran dan usaha tentang kesehatan melalui manajemen monitoring yang terpadu melalui pendekatan ruang (lorong) dengan basis inisiasi dan partisipasi masyarakat.

bersih sehat menjadi tidak maksimal, begitu pula dengan pelaksanaan upaya penanganan masalah dan berbagai upaya mengubah pola hidup warga menjadi lebih bersih dan sehat.

Dari berbagai permasalahan tersebut dan dengan niat untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan menginisiasi sebuah terobosan yang dinamakan Lorong Sehat. Dengan menekankan pada proses yang partisipatif, inisiatif Lorong Sehat ini juga diharapkan dapat mendobrak kebuntuan atas keterbatasan penanganan pengumpulan data dasar kesehatan yang tak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan petugas Puskesmas. Dengan partisipasi aktif warga di setiap lorong, proses pendataan menjadi lebih efektif. Data-data yang dikumpulkan dapat sekaligus dimanfaatkan oleh program layanan kesehatan seperti Peningkatan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Keluarga Sehat, Stiker Baduta (program yang menasar bayi berumur di bawah 2 th), Stiker P4K (program bagi ibu-ibu hamil), Kartu Rumah Sehat, Stiker Bebas Jentik), lingkungan yang bersih, hijau serta perubahan perilaku kesehatan pada setiap anggota keluarga.

Apa itu Lorong Sehat?

Lorong Sehat (Longset) pada dasarnya adalah daerah binaan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang secara teknis dikerjakan oleh Puskesmas bersama masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini meliputi pendataan kesehatan, penataan lingkungan agar menjadi bersih dan hijau, serta kegiatan peningkatan pemahaman untuk mengubah perilaku anggota keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Program ini penting karena dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam waktu yang relatif singkat melalui penataan lingkungan lorong menjadi lebih bersih, hijau, dan indah. Warga menjadi lebih sadar untuk memelihara kebersihan lingkungannya. Pada akhirnya, perubahan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan yang disebabkan kebiasaan warga yang belum menyadari perilaku hidup bersih dan sehat.

Program Lorong Sehat secara teknis dilaksanakan langsung oleh 46 Puskesmas dalam wilayah Kota Makassar. Setiap Puskesmas

menangani setidaknya satu lorong binaan yang menjadi percontohan. Tiap tahun, jumlah lorong yang dibina akan bertambah.

Setelah terkumpul data mengenai masalah kesehatan melalui Program Lorong Sehat, maka dibuatlah upaya tindak lanjut mengatasi permasalahan berdasar 10 indikator PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) yang disusul dengan diterbitkannya Surat Keputusan Anak Lorong Peduli Kesehatan yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan dari masing-masing wilayah Lorong Sehat. Surat Keputusan ini menandai komitmen warga untuk menyukseskan pembinaan kesehatan yang berkesinambungan.

Berubah Setelah Lorong Sehat

Sebelum ada Lorong Sehat di Kota Makassar, Upaya untuk mengatasi ancaman lingkungan yang buruk dari wilayah masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, universitas dan penelitian lembaga, organisasi berbasis masyarakat dan organisasi non-pemerintah namun belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Selain itu, kegiatan pendataan informasi kesehatan masih bertumpu pada petugas kesehatan. Banyak masalah kesehatan penduduk yang baru diketahui setelah diberitakan oleh media. Warga belum sadar untuk melaporkan kondisi lingkungannya yang buruk, termasuk jika ada warga yang sakit.

Tingkat kepercayaan terhadap pengobatan alternatif tergolong masih tinggi. Apalagi pihak pelaksana pengobatan alternatif memang menasar warga kelas menengah ke bawah yang sebagian besar bermukim di lorong-lorong yang tak terjangkau oleh unit pelayanan kesehatan. Pada banyak kasus, pendataan petugas kesehatan baru mengetahui kondisi kesehatan seorang warga ketika sudah dalam kondisi kritis, akibatnya petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan penanganan.

Untuk mengubah perilaku hidup warga menjadi lebih bersih dan sehat, Program Lorong Sehat diawali dengan pemetaan dan penyuluhan untuk deteksi dini warga yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa pendekatan berbasis potensi juga diterapkan oleh program ini, misalnya penanganan lingkungan menggunakan konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dengan mengutamakan partisipasi aktif warga.

Selain itu, program ini juga diintegrasikan dalam Program Makassar Ta' Tidak Rantasa (MTR) untuk mendorong percepatan pergerakan warga yang bermukim di lorong-lorong dalam



berpartisipasi aktif meningkatkan kebersihan lingkungan untuk mencapai nilai minimal 87 dalam penilaian Adipura Kota Makassar.

Pembelajaran dari Lorong Sehat

Pelajaran penting yang bisa dipetik dari program ini adalah betapa keinginan warga sebenarnya sangat sederhana dan bukanlah hal yang sulit. Warga kota Makassar menginginkan kehadiran pemerintah ketika mereka mengalami kesulitan termasuk ketika kesehatan mereka bermasalah. Mereka tidak membutuhkan hal yang luar biasa di luar batas kemampuan pemerintah. Tetapi keinginan mereka adalah kebutuhan dasar yang sebenarnya amat mudah dipenuhi oleh pemerintah. Tinggal kemauan, ketulusan, inisiatif, kreatifitas dan inovasi dari pemerintah untuk menjawab banyak keinginan rakyat yang sederhana tersebut.

Melalui Lorong Sehat, pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan membuat warga tidak lagi segan memberikan informasi bagi petugas kesehatan



saat melakukan pendataan kesehatan dasar di tiap rumah. Bila upaya pemerintah dilaksanakan dengan dukungan penuh warga dan berfokus pada partisipasi aktif warga sebagai kunci keberhasilan, maka program tersebut akan membuahkan hasil yang luar biasa dan terus berlanjut. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Makassar telah memikirkan keberlanjutannya. Untuk itulah, berbagai penyiapan telah dilakukan agar program ini tak hanya sekedar menjadi program seremonial yang dilaksanakan hanya sesaat saja. Dampak besar terhadap kehidupan warga Kota Makassar membuat Lorong Sehat wajib dipertahankan dan dijamin keberlangsungannya.

Dalam penyediaan anggaran, keberlanjutan program ini telah dipikirkan kelanjutannya dengan telah terbangunnya komitmen antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Makassar dalam dukungan anggaran yang akan dianggarkan secara rutin untuk program ini. Penyediaan anggaran dilakukan dengan memasukkan anggaran Telemedisin dalam nomenklatur dokumen anggaran pada Dinas Kesehatan Kota

Makassar. Untuk tahun 2017 misalnya, Dinas Kesehatan telah menyiapkan anggaran lebih dari 600 juta rupiah untuk menjamin kelangsungan program.

Replikasi Program

Model Program Lorong Sehat ini sedang berusaha diadopsi dan direplikasi oleh Pemerintah Kota Makassar ke dalam beberapa rancangan program pelayanan publik yang lain, seperti Lorong Garden maupun lorong KB. Aplikasi ini akan dikembangkan oleh Kelurahan dan Badan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Bagian Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar dan dapat dihubungi melalui email ikrom.trianto03@gmail.com

Tukar Pengalaman 3 Kabupaten MELAYANI di Kubu Raya

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Tambah, tambah, tambah!” seru anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Suara Alam sambil mengetuk-ngetukkan mangkuk dan sendok kosong mereka ke meja. Sekira lima belasan anak berseragam olah raga hijau yang duduk mengitari meja siang itu asyik menikmati sup makaroni yang disiapkan sekolah sebagai bagian dari program peningkatan gizi siswa. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan kehadiran rombongan peserta tukar pengalaman pemerintah daerah mitra dampingan Program MELAYANI yang mengunjungi mereka. PAUD adalah salah satu tempat yang dikunjungi oleh peserta Rapat Koordinasi dan tukar pengalaman Pemerintah Kabupaten Belu dan Kabupaten Bojonegoro.



Kegiatan rapat koordinasi dan tukar pengalaman antar pemerintah daerah dampingan program MELAYANI bertujuan untuk membangun koordinasi teknis antar pemangku kepentingan dari daerah dampingan agar pelaksanaan program lebih efektif di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pula terjadi pertukaran pengalaman antara daerah dampingan satu dengan daerah lainnya terkait pendekatan, capaian dan tantangan program. Selain itu melalui kegiatan ini dimaksudkan agar praktik-praktik baik dalam hal pendekatan yang telah diterapkan dapat teridentifikasi untuk dijadikan pembelajaran dan dipraktikkan di daerah masing-masing.

Melalui pertemuan yang dilaksanakan tanggal 8 Mei 2018 ini juga diharapkan dapat teridentifikasi capaian dan tantangan pelaksanaan program MELAYANI selama periode Februari sampai dengan Mei 2018; serta strategi pelaksanaan program yang efektif dapat terpetakan untuk dilaksanakan pada periode Mei sampai dengan Agustus 2018.

MELAYANI (Mengurai Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia) adalah sebuah program yang mendukung pemerintah daerah untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam menanggulangi masalah-masalah layanan dasar dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri.

Program MELAYANI yang didukung Bank Dunia ini, bekerja di tiga lokasi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini. Ketiga lokasi tersebut adalah Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat, Kabupaten Belu-Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur. Fokus isu antara kabupaten satu dengan kabupaten lain berbeda-beda, misalnya saja di Kabupaten Kubu Raya memilih isu *Stunting* sebagai isu prioritas untuk diselesaikan bersama-sama melalui Program MELAYANI. Di Kabupaten Belu memilih isu prioritas Rendahnya Kualitas Pendidikan dan di Kabupaten Bojonegoro memilih isu Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir. Pemilihan isu ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri melalui sebuah *workshop*.

Untuk saling bertukar informasi bagi Pemerintah Kabupaten antar daerah dampingan, Program MELAYANI telah melaksanakan kegiatan Pertemuan MELAYANI yang pertama di Kabupaten Bojonegoro pada pertengahan Februari 2018. Pada pertemuan ini dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan

Kabupaten Belu untuk saling berbagi informasi terkait pendekatan, capaian dan tantangan selama pelaksanaan Program MELAYANI di daerah masing-masing.

Pertemuan MELAYANI kedua kali ini dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Belu. Fokus utama kegiatan ini terkait “Strategi Penurunan Angka *Stunting*” yang sedang menjadi perhatian khusus dalam menyelesaikan layanan dasar. Selain dilakukan diskusi juga ada kegiatan kunjungan lapangan ke unit layanan.

Pertemuan Koordinasi dan Tukar Pengalaman

Sebelum mengadakan kunjungan ke Puskesmas dan PAUD, Tim Pemkab Bojonegoro dan Belu terlebih dahulu diterima secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di ruang Media Centre Kantor Bupati Kubu Raya. Pertemuan ini diawali dengan sambutan dari *Team Leader* Program MELAYANI World Bank, Bapak Ahmad Zaki.

Dalam sambutannya Pak Ahmad Zaki menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah bagian dari kegiatan program MELAYANI. Program ini mencoba memfasilitasi pemerintah daerah untuk menguraikan permasalahan layanan dasar di tiga kabupaten yakni Belu, Bojonegoro dan Kubu Raya. Lebih lanjut Pak Ahmad Zaki menjelaskan bahwa Indonesia setelah desentralisasi, tanggung jawab penyelenggaraan layanan dasar diserahkan ke pemerintah daerah pada umumnya telah berhasil terutama dalam peningkatan akses, tapi kita menghadapi tantangan baru dalam layanan dasar yang belum terpecahkan seperti *stunting*, kematian ibu dan bayi baru lahir dan perbaikan kualitas pendidikan. Tantangan-tantangan ini membutuhkan satu pencarian solusi yang lebih komprehensif dibanding masalah peningkatan akses, peningkatan kualitas pendidikan. Dibutuhkan analisa yang lebih baik dan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mengatasi masalah.

Sambutan kemudian secara berturut-turut dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ibu Ninik Susmiati, dilanjutkan dengan sambutan dari Kasubid Kurikulum SMP Kabupaten Belu, Bapak Ramos. Sambutan sekaligus pembukaan dari Pemkab Kubu Raya mewakili Bupati dibawakan oleh Kepala BAPPEDA, Bapak Yusran Anizam. Bapak Yusran dalam sambutannya menyampaikan beberapa



Foto : Sumami Arianto/ Yayasan BaKTI

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah sangat kompleks terutama terkait layanan dasar.

persoalan mendasar yang ada di Kubu Raya seperti tingginya angka *stunting* Kubu Raya yang mencapai 34,8% (berdasarkan data dari Dinas Kesehatan). Angka ini menurut beliau sangat mengkhawatirkan sehingga Pemda Kubu Raya sangat berterimakasih dengan hadirnya program MELAYANI oleh Bank Dunia ini, karena sebagai sebuah kabupaten yang tergolong baru, pendampingan dalam menyelesaikan persoalan layanan dasar akan sangat membantu. Melalui

pertemuan ini juga, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap ada pembelajaran-pembelajaran dari proses MELAYANI yang bisa dibagi oleh peserta dari Kabupaten Belu dan Bojonegoro.

Setelah sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan pertukaran pengalaman. Masing-masing daerah mempresentasikan isu prioritas yang dihadapi. Presentasi pertama disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Mustafa Bakri. Dalam pemaparannya, diketahui bahwa prevalensi *stunting* Kubu Raya berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan Dinas Kesehatan tahun 2017 adalah 34,8%. Sementara Angka Stunting di daerah pedesaan memiliki proporsi yang lebih besar (40 %) dibandingkan dengan daerah perkotaan (33 %). Kasus *stunting* lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat miskin.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Kubu Raya dalam menurunkan angka *stunting* adalah seperti peningkatan kapasitas petugas gizi, bidan dan kader posyandu tentang pemberian

makanan bayi dan anak, peningkatan kapasitas petugas gizi dan bidan dalam hal pemantauan pertumbuhan, peningkatan kapasitas petugas gizi dan bidan dalam hal konseling menyusui dan peningkatan kemampuan kader dalam hal *Interpersonal Communication (IPC)*. Bersama tim MELAYANI, Pemerintah Daerah telah membentuk tim *Ad Hoc* untuk pencegahan *stunting* tingkat kabupaten, menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2017-2019 serta mengurai masalah *stunting* dengan menggunakan metode *fish-bone*.

Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ibu Ninik Susmiati mengenai Permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi di Kabupaten tersebut. Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Kasubid Kurikulum SMP Kabupaten Belu, Bapak Ramos tentang kondisi pendidikan di Kabupaten Belu.

Di akhir sesi pertukaran pengalaman ini diadakan sesi diskusi, beberapa peserta memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan terkait materi yang disampaikan. Sesi diskusi ini merupakan rangkaian terakhir kegiatan pertukaran pengalaman antar kabupaten dampingan Program MELAYANI, sebelum melaksanakan kunjungan lapangan.

Kunjungan Lapangan

Untuk melihat langsung bagaimana upaya Kubu Raya dalam pengentasan *stunting*, kunjungan lapangan dilaksanakan. Tempat pertama yang dikunjungi adalah PAUD Suara Alam. Untuk mencapai lokasi PAUD Suara Alam yang tidak jauh dari perbatasan kota Pontianak dan Kubu Raya, rombongan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Bangunan PAUD dilengkapi beberapa fasilitas seperti kebun gizi, sarana kolam renang, ruang pemeriksaan kesehatan dan taman bermain. Menurut guru PAUD tersebut, secara rutin siswa diukur tinggi dan berat badannya untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan siswa. Pihak PAUD bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal pemantauan status gizi anak dan penyusunan menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dilakukan petugas puskesmas secara berkala. Seperti siang itu, mereka sedang lahap menyantap sup makaroni sebagai salah satu menu pemberian makanan tambahan.

Rombongan kemudian bergerak ke lokasi kunjungan ke dua yakni Puskesmas Sungai Raya Dalam untuk melihat bagaimana pemantauan

status gizi setiap anak yang berobat di Puskesmas ini, apapun penyakit Balita tetap dilakukan penapisan status gizinya dengan melakukan antropometri (pengukuran). Setelah berdiskusi dengan dokter, perawat dan kepala puskesmas, rombongan bergerak ke lokasi kunjungan selanjutnya yakni ke Puskesmas Sungai Durian.

Di Puskesmas ini rombongan disambut hangat oleh seluruh jajaran dan staf Puskesmas. Di tempat ini rombongan melihat penanganan kasus gizi buruk, salah satunya berupa intervensi TFC (*Therapeutic Feeding Centre*). TFC adalah sarana pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pemberian makanan secara intensif sesuai umur dan kondisi anak. Perawatan TFC dilaksanakan dengan 3 aspek yaitu: asuhan medis, asuhan nutrisi dan asuhan keperawatan. Puskesmas Sungai Durian merupakan satu-satunya puskesmas yang memiliki TFC di Kabupaten Kubu Raya. Peserta kunjungan juga tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang inovasi berupa penggunaan kartu informasi ibu hamil yang dipajang di salah satu dinding ruangan. Melalui papan informasi yang berisi kartu-kartu dengan aneka warna ini, status kesehatan ibu bisa diketahui termasuk deteksi awal ibu dengan resiko tinggi.

“Beberapa hal baru yang dapat kami coba terapkan di Bojonegoro dari kunjungan ini adalah seperti kerjasama antara PAUD dengan Puskesmas untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, membantu menyusun menu PMT yang sesuai dengan standar nutrisi, serta Puskesmas yang melakukan pemantauan status gizi bagi pasien Balita apapun penyakitnya. Layanan penanganan TFC bagi penderita gizi buruk yang diterapkan di Puskesmas Sungai Durian juga menarik untuk direplikasi” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ibu Ninik Susmiati.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah sangat kompleks terutama terkait layanan dasar. Analisa yang baik serta detail dalam merumuskan akar masalah dan solusinya sangat diperlukan, demikian pula dengan kerjasama yang baik antar sektor terkait. Memperkaya referensi bisa dilakukan dengan belajar dibanyak tempat, salah satunya dengan bertukar pengalaman dan pembelajaran seperti yang dilakukan dalam program MELAYANI ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MELAYANI, hubungi info@bakti.or.id



Foto : Farid/ Yayasan BaKTI

Dongeng Keliling Mendorong Cinta Pustaka di Makassar

Oleh **TULUS WULAN JUNI**

Perpustakaan keliling selama ini biasanya hanya memberikan layanan membaca di tempat saja padahal pembaca khususnya anak-anak lebih suka dibacakan cerita atau mendengarkan dongeng sehingga kunjungan per hari masyarakat ke perpustakaan keliling hanya berkisar rata-rata 20-50 orang/kunjungan.

Angka minat baca di Kota Makassar berdasarkan *survey* Independen Tri Tunggal Sejaya pada tahun 2015 masih rendah yakni diangka 28,34 % sedangkan budaya menulis 29,21 %. Dari data tersebut juga terungkap bahwa sekitar 55 % masyarakat di Kota Makassar belum pernah berkunjung ke Perpustakaan Umum Kota Makassar dengan berbagai alasan seperti jaraknya terlalu jauh (45 % responden) dan tidak ada waktu karena sibuk (18% responden). Selain itu yang menyedihkan hanya 0,86 % responden yang memiliki motivasi membaca sebagai referensi tulisan.

Perpustakaan keliling merupakan layanan ekstensi dari layanan Perpustakaan Umum Kota Makassar yakni memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan. Layanan perpustakaan

keliling biasa juga disebut layanan bergerak yang mendatangi tempat-tempat umum atau tempat konsentrasi masyarakat seperti di sekolah, kantor kecamatan/ kelurahan, pasar, puskesmas dan tempat umum lainnya.

Dongkel with Mobile Library

Awal tahun 2016, perpustakaan keliling Kota Makassar melakukan inovasi dengan memberikan layanan tambahan dongeng keliling dengan nama program Dongeng Keliling bersama Perpustakaan Keliling (*Dongkel with Mobile Library*). Program *Dongkel with Mobile Library* yang sudah berjalan setahun ini merupakan program yang dirancang sebagai daya tarik perpustakaan keliling khususnya kepada anak-anak untuk gemar membaca. Selain itu layanan ini sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai pendongeng atau yang hobi dengan mendongeng. Dengan program ini perpustakaan keliling mampu merekrut 16 pendongeng yang terdiri dari pendongeng lokal, alumni juara dongeng dan pemerhati minat baca. Setelah program ini berjalan, antusias masyarakat yang dikunjungi perpustakaan keliling sangat tinggi bahkan meminta untuk dikunjungi ulang.

Program ini berawal dari usulan Pustakawan dalam sebuah diskusi penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA) pada akhir tahun 2015. Pustakawan menginginkan ada layanan tambahan di perpustakaan keliling selain membaca ditempatkan untuk mengakomodir kebutuhan pembaca anak-anak. Layanan tambahan tersebut adalah layanan mendongeng dengan melibatkan pendongeng lokal atau alumni hasil seleksi lomba mendongeng tingkat Kota dan Provinsi dengan model pendekatan *Intelektual, Emotional, Spiritual Quotient (IESQ) Based Learning* atau menyeimbangkan tiga kecerdasan yakni Intelektual, Emotional dan Spiritual dengan konsep simbiosis mutualisme untuk mengembangkan budaya baca secara bersama-sama.

Selain itu Dongkel *with Mobile Library* ini sekaligus memberdayakan para pendongeng lokal di Kota Makassar dan wadah mengaktualisasi diri di tengah-tengah masyarakat. Dongeng telah diakui sebagai cara yang paling ampuh untuk menanamkan nilai-nilai moral, budaya, budi pekerti, gagasan atau pikiran dan peletak dasar kebiasaan membaca.

Program Dongkel *with Mobile Library* juga melestarikan cerita-cerita rakyat daerah dan menghidupkan kembali budaya mendongeng di tengah-tengah masyarakat sehingga jati diri bangsa khususnya sebagai masyarakat Kota Makassar dapat terpelihara. Dengan memilih cerita yang tepat dan bercerita dengan cara yang dapat merebut hati anak, kita dapat menyelipkan berbagai informasi yang berguna untuk mendidik mereka.

Program Dongkel *with Mobile Library* sangat berbeda dengan layanan perpustakaan keliling yang ada di Indonesia. Biasanya perpustakaan keliling hanya memberikan pelayanan membaca di tempat, membuka pos layanan peminjaman, konsultasi perpustakaan dan menyediakan alat peraga permainan. Dongkel *with Mobile Library* bekerja sama dengan beberapa pendongeng Kota Makassar untuk menggunakan dongeng sebagai media pengantar sebelum pengunjung menikmati bacaan yang tersedia di perpustakaan keliling.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program terbagi atas tiga unsur. Ketiga unsur ini saling berkoordinasi untuk kelancaran kegiatan Dongkel *with Mobile Library*. Unsur pertama adalah personel perpustakaan termasuk sopir dan pendamping. Unsur kedua adalah panitia kegiatan yang terdiri dari pimpinan dan pustakawan. Unsur ketiga adalah komunitas dongeng dan pendongeng. Jumlah pendongeng yang terdaftar dalam kegiatan ini mencapai 20 orang.



Sarana Prasarana Program Dongkel *with Mobile Library* didukung oleh tiga unit armada mobil perpustakaan keliling bantuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diberikan pada tahun 2005, 2008 dan 2016. Ketiga unit Perpustakaan Keliling memiliki koleksi 1.770 judul buku sebanyak 3.718 eksemplar. Selain tiga unit mobil, program ini juga mengelola satu unit Motor Pintar bantuan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pada tahun 2012 yang memiliki koleksi sejumlah 703 judul buku sebanyak 1.405 eksemplar. Seluruh armada mobil Perpustakaan Keliling telah dilengkapi fasilitas *microphone* dan penguat suara untuk mendukung aktivitas mendongeng.

Sumber daya keuangan program ini didukung melalui kegiatan layanan perpustakaan keliling yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar yang kini nomenklaturnya telah berubah menjadi Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Selain itu biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) seluruh armada mobil



Foto : Farid/ Yayasan BaKTI

perpustakaan keliling telah masuk dalam pembiayaan kendaraan operasional di Dinas Perpustakaan Kota Makassar sehingga dari segi pembiayaan telah terjamin setiap tahun.

Budaya Baca yang Meningkat

Dongeng keliling bersama perpustakaan keliling atau *Dongkel with Mobile Library* dengan banyak manfaat yang dihasilkan merupakan salah satu layanan unggulan perpustakaan dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan dan budaya baca di Kota Makassar. Kehadiran *Dongkel with Mobile Library* menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap cerita rakyat daerah, mengenal budayanya dan salah satu upaya menanamkan budi pekerti luhur dan kepekaan sosial.

Dalam dua tahun pelaksanaannya, *Dongkel with Mobile Library* telah meningkatkan jumlah pengunjung atau pembaca di Perpustakaan Keliling. Pada tahun 2016, Pengunjung naik rata-rata 100 kunjungan per hari. Sebagian besar pengunjung adalah anak-anak. Seiring dengan

meningkatnya permintaan kunjungan Perpustakaan Keliling angka budaya baca di tahun 2016 naik menjadi 39,49 % dari 28,34% di tahun sebelumnya.

Program *Dongkel with Mobile Library* dapat terus berlanjut dengan dimasukkannya kegiatan ini dalam DPA Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan menjadi kegiatan unggulan di RENSTRA Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Kegiatan ini telah mendapat apresiasi dan telah dikenal oleh berbagai tingkatan sekolah mulai TK, SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Makassar serta komunitas dongeng yang ada Kota Makassar. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan tertarik mereplikasi kegiatan ini diantaranya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pinrang melakukan komunikasi dengan tim *Dongkel with Mobile Library* dan rencananya akan melakukan kegiatan serupa di tahun 2018.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Pustakawan Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan dapat dihubungi via email twj_19@yahoo.co.id



Gerakan Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Foto: Ihsan Djunaid / Yayasan BaKTI

Usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi perempuan dan anak menjadi usulan di berbagai tempat, namun usulan tersebut tidak mendapat perhatian serius dari anggota DPRD yang melakukan reses, karena usulan tidak disertai dengan data-data di lapangan.

Permasalahan perempuan dan anak masih dianggap sebagai masalah kecil dan masalah domestik, atau masalah rumah tangga. Karena itu, jika terjadi kasus-kasus yang menempatkan perempuan dan anak sebagai korban, misalnya kekerasan yang pelakunya adalah keluarga atau orang-orang terdekat, maka dianggap sebagai masalah rumah tangga atau masalah keluarga, bukan masalah publik, apalagi masalah negara.

Tidak hanya masyarakat umum yang menganggap masalah perempuan dan anak sebagai masalah domestik. Masih banyak aparat negara memandang masalah perempuan dan anak bukan urusan negara atau pemerintah. Jadi jangan heran, jika banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, tapi tidak diproses atau prosesnya tidak sesuai dengan harapan korban.

Cara pandang dalam melihat dan menilai permasalahan perempuan dan anak sebagai masalah domestik bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, atau turun dari langit, tetapi melalui proses yang panjang di masyarakat. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dewasa sebagai penguasa terhadap perempuan dan anak, tidak hanya membuat perempuan dan anak terpinggir di ruang publik, tetapi juga mencegah dan menghambat keduanya dalam mengakses layanan.

Masyarakat Sadar dan Peduli

Belajar dari Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yang dilaksanakan oleh Yayasan BaKTI, bahwa cara berpikir dan menempatkan perempuan dan anak sebagai

kelompok marjinal dapat diubah, tentu dengan pendekatan yang tepat, sesuai dengan kelompok sasaran.

Pembentukan kelompok konstituen, salah satu komunitas politis di masyarakat adalah contoh baik mengenai masyarakat sadar dan peduli terhadap perempuan dan anak. Kelompok konstituen dibentuk untuk menjembatani kesenjangan hubungan antara konstituen sebagai pemilih dan wakilnya di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kelompok ini diperkuat untuk menjadi kelompok terdepan dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Dalam perjalanan 3 tahun yang dimulai sejak tahun 2014, kelompok konstituen menjadi institusi yang sangat berpengaruh dan berperan di masyarakat. Kelompok konstituen mampu menjadi lembaga yang menerima dan mendampingi korban kekerasan dan berbagai permasalahan masyarakat. Pengurus kelompok yang sebagian besar perempuan juga mampu membangun hubungan dengan organisasi lain, termasuk dengan pemerintah dan wakilnya di DPRD.

Kemampuan dan kekuatan pengurus kelompok konstituen dalam membangun pemberdayaan hingga mengadvokasi kebijakan dimulai dari kesadaran mengenai ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Kesadaran mengenai ketidakadilan dan hak-hak perempuan dan anak mengantar individu dan kelompok peduli dan mau berbuat, tidak hanya untuk kelompoknya, tetapi juga untuk lingkungannya.

Peraturan Daerah

Sebagai kelompok berdaya dan kritis, kelompok konstituen juga diperkuat untuk melakukan advokasi pada level yang lebih tinggi, tentu sesuai dengan kapasitas dan peran yang dapat dilakukan. Ketika anggota DPRD melakukan reses, maka salah satu yang diusulkan oleh kelompok konstituen dan masyarakat yang hadir adalah pembentukan peraturan untuk melindungi perempuan dan anak.

Usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi perempuan dan anak menjadi usulan di berbagai tempat, namun usulan tersebut tidak mendapat perhatian serius dari anggota DPRD yang melakukan reses, karena usulan tidak disertai dengan data-data di lapangan.

Usulan dari kelompok konstituen disertai dengan data-data yang dikumpulkan di lapangan. Data yang dikumpulkan berasal dari warga yang



melapor atau jangkauan yang dilakukan oleh kelompok konstituen. Data dari kelompok konstituen adalah data riil dari lapangan, di mana masyarakat mengalaminya sebagai korban. Ketika masyarakat mencari jalan penyelesaian maka masalah baru akan dihadapi, dari produser yang rumit, aparat yang tidak mempunyai perspektif, dan sebagainya.

Berdasarkan usulan yang disertai data-data riil, anggota DPRD mempunyai cukup fakta untuk mengusulkan pembentukan Perda. Ketika Perda dalam proses pembentukan dan Pansus (Panitia Khusus) membutuhkan data dan informasi di lapangan, maka kekuatan kelompok konstituen sangat penting untuk menyuplai data dan informasi.

Pengalaman pembentukan Perda di beberapa daerah memberi pelajaran berharga mengenai peran serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok konstituen. Perda-perda yang

pembentukan melibatkan masyarakat secara luas antara lain Perda Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Perda Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak, serta Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Desa

Pembentukan Perda mengenai perlindungan perempuan dan anak di beberapa daerah tidak serta merta menyelesaikan masalah. Dukungan terhadap P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu

Kegiatan konsultasi publik penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur.

FOTO: Dok. Yayasan BaKTI



Foto : Dok. Yayasan BaKTI

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai lembaga layanan terhadap korban diharapkan dapat mengatasi sejumlah persoalan, terutama penanganan korban kekerasan. Namun jangkauannya tetap terbatas.

Selain berada di kabupaten/kota, jumlah dan kapasitas staf P2TP2A tidak memungkinkan menjangkau dan menangani jumlah kasus yang melimpah. Karenanya dukungan dan keterlibatan masyarakat tetap dibutuhkan. Institusi semacam kelompok konstituen tetap diperlukan untuk berperan aktif, termasuk advokasi di tingkat lebih rendah, seperti kecamatan dan desa/kelurahan.

Lagi-lagi ada pembelajaran di tingkat desa. Di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Belu (Nusa Tenggara Timur), kelompok konstituen mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai perlindungan perempuan.

Pembentukan Perdes memungkinkan Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai instrumen untuk mencegah dan menangani perempuan dan anak korban kekerasan.

Awal tahun 2018 di Desa Kembang Kerang telah disahkan Peraturan Desa Kembang Kerang Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu terobosan menarik dalam Perdes ini adalah mengenai Bale Balaq. Bale Balaq adalah tempat sementara bagi korban untuk pembinaan yang sifatnya kekeluargaan, diberikan dengan cara yang baik untuk tujuan mengembalikan kehidupan dalam keluarga.

Di dalam Perdes tersebut disebutkan bahwa pemerintah desa menyediakan Bale Balaq, yang berfungsi sebagai: (a) rumah singgah sementara bagi korban; (b) rumah aman sementara bagi korban; (c) rehabilitasi sementara bagi korban; (d) konseling sementara pada korban; (e) mediasi antara korban, keluarga dan pelaku; dan (f) reintegrasi korban dengan keluarga dan masyarakat. Bale Balaq dapat diadakan di rumah tokoh masyarakat, rumah kepala dusun, atau Bale Balaq yang disiapkan oleh Pemerintah Desa.

Pengaturan Bale Balaq menjadi rumah sementara, rumah singgah, rumah aman, atau *shelter* bagi penanganan korban merupakan terobosan yang baik. Aturan ini tidak hanya melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah, tetapi juga mengembalikan budaya lokal dan kekuatan kekeluargaan masyarakat.

Perdes tersebut menjadi salah satu instrumen bagi masyarakat berperan aktif dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Namun, sebagai warga negara, masyarakat mengadvokasi negara untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga. Perdes Kembang menjadi contoh bagaimana Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi gerakan sosial.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, hubungi info@bakti.or.id

A group of diverse school children, mostly of Southeast Asian descent, are gathered outdoors in a lush, green rural setting. They are wearing yellow and green striped school uniforms. The children are smiling and looking towards the camera. Some are pointing their fingers, and one child in the foreground is holding a yellow and orange juice bottle. The background shows a dirt path and dense tropical vegetation.

Layanan Pendidikan bagi Anak Rentan dan yang Berkonflik dengan Hukum

Oleh **ARAFAH**



Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI

Pendidikan memegang peranan penting untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Kompleksnya pengalaman buruk yang dialami anak rentan dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH), berdampak pada perjalanan hidup masing-masing anak. Tidak jarang diantara mereka ditolak oleh keluarga, lingkungan dan masyarakat dimana mereka berada. Kadang orangtua mereka sendiri tidak peduli dengan nasib mereka. Kondisi inilah yang membuat anak rentan dan AKH sulit menata masa depan yang lebih baik. Ketika mengalami kerentanan dan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, rata-rata diantara mereka mengalami putus sekolah. Walaupun sebagian dari mereka yang putus sekolah disebabkan oleh faktor lain seperti bekerja, menikah diusia anak, mengalami sakit kronis, disabilitas, kecanduan *game online*, terlantar, dan terpapar NAPZA dan pergaulan beresiko lainnya.

Faktor penyebab tersebut dapat diminimalisir dengan adanya komitmen dan kesadaran dari berbagai pihak. Peran keluarga, lingkungan, sekolah, dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanggulangan anak putus sekolah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan diharapkan mampu membantu mereka agar tetap bisa melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal.

Upaya yang Dilakukan

Sebagai upaya membangun komitmen mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi anak rentan dan putus sekolah, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar melaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Monitoring Lintas Sektor yang fokus pada topik pengembalian anak putus sekolah. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi dan kebijakan tentang layanan pendidikan bagi anak putus sekolah yang berasal dari keluarga rentan dan anak berkonflik dengan hukum. Para pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dalam mendukung pemenuhan hak dasar khususnya pendidikan. Menyediakan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua anak menjadi hal penting.

Berdasarkan data hasil penjangkauan PKSAI Kota Makassar, pada Januari 2018, di 18 Kelurahan dari 4 Kecamatan (Tamalate: Balang Baru, Barombong, Maccini Sombala, Mangasa, Pa'baeng-baeng, Parang Tambung. Tallo: Lembo, Tallo, Pannampu, Bunga Ejaya, Kaluku Bodoa.

Untuk merespon isu pendidikan sebagai hak dasar anak, sangat dibutuhkan jejaring atau kemitraan yang luas dan solid.

Panakkukkang: Pampang, Karuwisi, Panaikang, Tamamaung, dan Biringkanayya: Paccerakkang, Sudiang, dan Sudiang Raya), terdapat 57 anak yang usia sekolah tapi belum sekolah dan 323 anak putus sekolah. Sebagai upaya mengembalikan anak hasil data penjangkauan ini, UNICEF bersama Yayasan BaKTI dengan melibatkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Makassar melakukan verifikasi dan mengumpulkan dokumen pendukung sebagai persyaratan mengakses layanan pendidikan formal atau non formal.

Dinas Pendidikan Kota Makassar pada 6 April 2018, memfasilitasi pertemuan dengan tim UNICEF bersama mitranya (Yayasan BaKTI dan Yayasan Indonesia Mengabdi), membahas langkah dan strategi pemenuhan pendidikan formal maupun non formal bagi anak rentan hasil penjangkauan PKSAI Kota Makassar dan Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH) pasca reintegrasi. Bidang Pendidikan Non Formal, Bidang Kurikulum, Bidang Pendidikan Dasar hadir memberikan kontribusi tentang penanganan anak putus sekolah.

Saat ini Dinas Pendidikan Kota Makassar memiliki program pengembalian anak ke layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu verifikasi data anak putus sekolah. Bagi anak-anak yang berminat melanjutkan pendidikan, maka Dinas Pendidikan menghubungkan mereka ke layanan Pendidikan Non Formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Mereka harus memenuhi beberapa persyaratan

Tantangan dan Solusinya

Verifikasi data dan penjangkauan anak putus sekolah di Makassar sedang dilakukan sebagai upaya pengembalian anak ke layanan pendidikan.

Namun tidak semua anak yang dijangkau dan diverifikasi ingin melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; faktor ekonomi, tidak memiliki biaya untuk sekolah, anak menjadi tulang punggung keluarga, malas belajar dan pergaulan beresiko lainnya.

Di Kota Makassar, penuntasan anak putus sekolah masih mengalami kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain arus urbanisasi yang besar sehingga jumlah anak usia sekolah terus menerus bertambah dan penempatan sekolah yang belum teralokasi optimal di tiap kecamatan dan kelurahan. Selain itu, kendala penuntasan anak putus sekolah juga disebabkan oleh penganggaran untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah dan jenis dan volume pelatihan peningkatan kompetensi pendidik baik tutor maupun guru masih sedikit.

Untuk mengatasi tantangan tersebut di atas, penting untuk mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi putus sekolah, sedang putus sekolah, dan bermasalah dengan hukum. Upaya menetapkan strategi dan dukungan juga perlu dilakukan untuk menurunkan angka anak putus sekolah melalui penerimaan siswa baru berbasis zonasi.

Sebuah struktur lintas koordinasi dengan *stakeholder* perlu dibangun untuk menuntaskan permasalahan anak putus sekolah. Selain itu juga perlu dibangun dukungan dari dunia usaha untuk memberikan dukungan dalam bentuk penerimaan calon tenaga kerja dari anak pendampingan serta dukungan *Cooperate Social Responsibility* dari BUMN dan BUMD. Pemerintah juga perlu menguatkan struktur kelembagaan dan infrastruktur sekolah baik formal dan non formal untuk memberikan akses pendidikan yang luas kepada masyarakat.

Untuk merespon isu pendidikan sebagai hak dasar anak, sangat dibutuhkan jejaring atau kemitraan yang luas dan solid. Kerjasama antara akademisi, pemerintah, masyarakat serta lembaga lain di luar lembaga pemerintah sangat diperlukan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program UNICEF-BaKTI, hubungi info@bakti.or.id

Persyaratan Mengakses Layanan Pendidikan Formal maupun Non Formal



PINDAH SEKOLAH

- Mendapatkan surat pindah dari sekolah asal sehingga Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mereka dipindahkan dari sekolah asal
- Daftarkan ke sekolah di Kota Makassar dengan membawa surat pindah



KEJAR PAKET A (SD)

- Mengisi Formulir Pendaftaran di tempat pendaftaran
- 5 lembar fotocopy Akte Kelahiran
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto ukuran 3x4 (10 buah) berwarna dengan latar merah dan mengenakan kemeja putih (bukan kaos). Foto akan digunakan untuk ijazah. Tulis nama di belakang foto.
- Sudah dapat membaca dan menulis dan berhitung (CALISTUNG).
- Usia calon tidak dibatasi (usia wajar DIKDAS 10 tahun keatas)
- Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan
- Dokumen dibawah ke Dinas Pendidikan Kota Makassar atau bisa dibawah langsung ke PKBM yang dikehendaki



KEJAR PAKET B (SMP)

- Mengisi Formulir Pendaftaran di tempat pendaftaran
- 5 lembar fotocopy ijazah SD (Legalisir).
- Foto ukuran 3x4 (10 buah). Foto berwarna dengan latar merah dan mengenakan kemeja putih (bukan kaos). Foto akan digunakan untuk ijazah. Tulis nama di belakang foto.
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Akte Kelahiran
- Usia calon tidak dibatasi (Usia wajar DIKDAS 12 tahun keatas)
- Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan
- Dokumen dibawah ke Dinas Pendidikan Kota Makassar atau bisa dibawah langsung ke PKBM yang dikehendaki



KEJAR PAKET C (SMA IPA & SMA IPS)

- Mengisi Formulir Pendaftaran di tempat pendaftaran
- 5 lembar fotocopy ijazah SMP (Legalisir).
- Foto Ukuran 3x4 (10 buah). Foto berwarna dengan latar merah dan mengenakan kemeja putih (bukan kaos). Foto akan digunakan untuk ijazah. Tulis nama di belakang foto.
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Akte Kelahiran
- Usia calon tidak dibatasi (Usia wajar DIKDAS 15 tahun keatas)
- Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan
- Dokumen dibawah ke Dinas Pendidikan Kota Makassar atau bisa dibawah langsung ke PKBM yang dikehendaki

Mengintip Kota-Kota Gudang Sampah di Indonesia

Oleh **IRMA GARNESIA**





Banyak faktor yang membuat target mengurangi sampah 70 persen di 2025 bakal sulit tercapai, salah satunya perilaku masyarakat.

Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Sampah yang dihasilkan juga banyak mencemari lautan yang sebagian dihasilkan dari wilayah daratan terutama kota-kota besar.

Diperkirakan ada sekitar 8 juta ton sampah plastik yang dibuang ke lautan setiap tahun di dunia. Jambeck, *et. al* (2015) pernah mempublikasikan penelitiannya yang berjudul *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean*.

Dalam riset yang dilakukan terhadap 192 negara, terlihat bahwa Indonesia menyumbang sebanyak 3,22 juta metrik ton (*millions of metric tons/MMT*) limbah plastik. Penelitian lebih spesifik dilakukan oleh Lamb, *et. al* (2018) yang berjudul *Plastic Waste Associated with Disease on Coral Reefs*. Riset ini menunjukkan bahwa sampah plastik paling banyak ditemukan di Indonesia, yakni 25,6 bagian per 100 m² terumbu karang di lautan.

Penelitian ini dilakukan terhadap 159 kawasan terumbu karang di Asia Pasifik pada periode 2011-

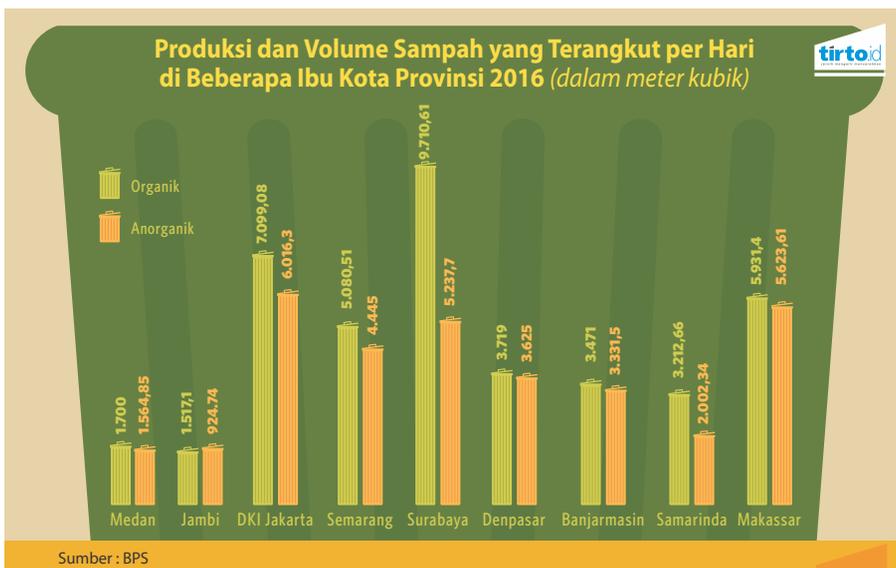
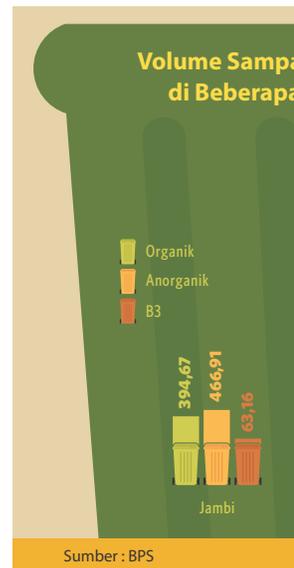
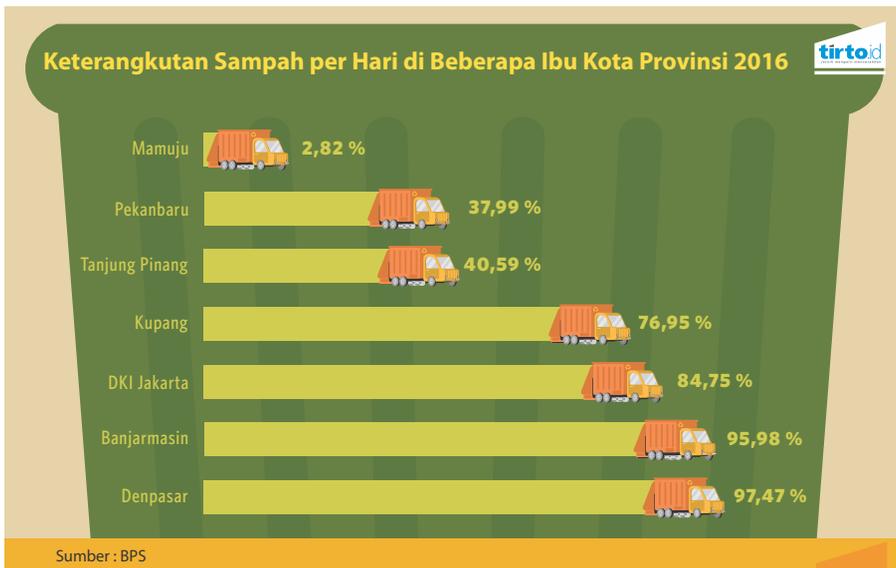
2014. Tingginya sampah plastik ini berkaitan dengan jumlah penduduk dan pengelolaan sampah, sekitar 80 persen sampah plastik berasal dari darat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016, produksi sampah per hari tertinggi berada di Pulau Jawa, khususnya Surabaya. Pada 2015, produksi sampah di Surabaya sebesar 9.475,21 meter kubik dan meningkat menjadi 9.710,61 meter kubik di 2016.

Wilayah lain di luar Pulau Jawa yang produksinya tinggi adalah Kota Mamuju, yaitu 7.383 meter kubik dan Kota Makassar, sebesar 5.931,4 meter kubik pada 2016. Dari pemantauan Statistik Lingkungan Hidup pada 2010 hingga 2016, ditemukan bahwa kota-kota di Indonesia pada umumnya mengalami kenaikan produksi sampah. Tentunya dengan Pulau Jawa sebagai penyumbang terbesar karena kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya.

Untuk itu, dalam upaya menanggulangi permasalahan sampah khususnya di lautan, Indonesia berencana mengurangi sampah di lautan sebesar 70 persen pada 2025. Rencana ini sempat disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, pada *East Asia Summit (EAS) Conference on Combating Marine Plastic Debris* yang diselenggarakan di Bali pada 6-7 September 2017.

Di Jakarta, dengan jumlah penduduk sekitar 10,25 juta jiwa pada 2016, produksi sampahnya diperkirakan sebesar 7.099,08 meter kubik, meningkat dari 7046,39 meter kubik pada tahun



sebelumnya. Sementara Surabaya, sebagai kota dengan produksi sampah tertinggi di Indonesia, meskipun dihuni oleh 2,87 juta jiwa pada 2017, jumlah produksi sampah di 2016 sebesar 9.710,61 meter kubik.

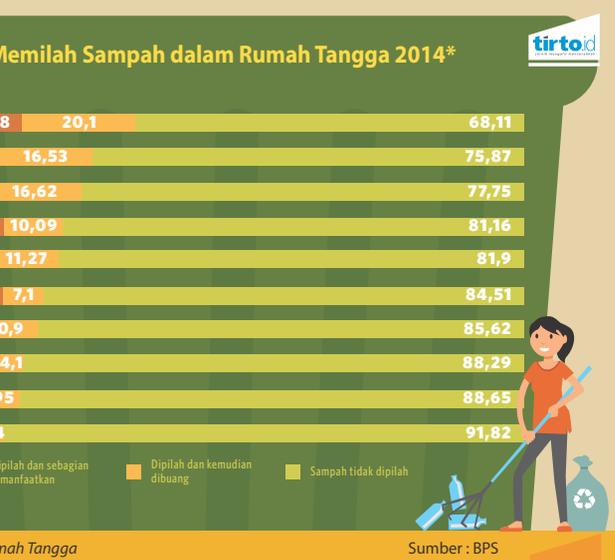
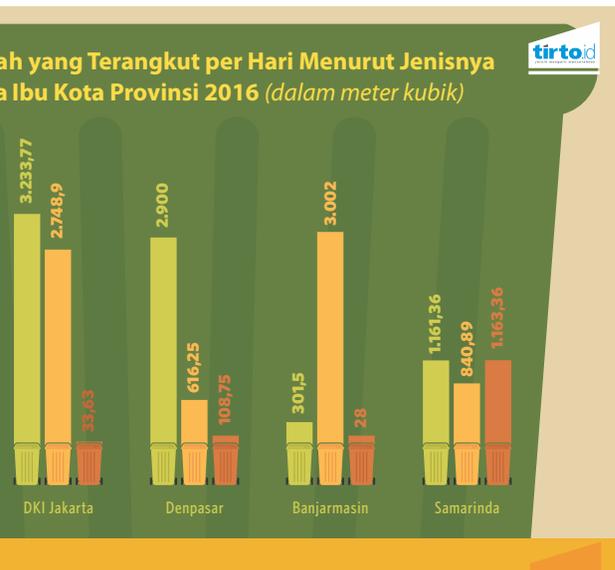
Di luar kepadatan penduduk, tingginya produksi sampah ini juga disebabkan banyaknya industri yang berkembang di kota tersebut. Selain itu, tingginya produksi sampah, ternyata tidak diimbangi dengan volume sampah yang terangkut. Pada 2016, dari 30 Ibu kota provinsi, rata-rata capaian keterangkutannya hanya 71,20 persen dari total produksi sampah.

Kota Denpasar, Bali merupakan kota dengan tingkat keterangkutan sampah terbesar di

Indonesia, yaitu 97,47 persen dari 3.719 meter kubik sampah yang diproduksi. Posisi Bali sebagai destinasi wisata internasional memang menjadi faktor capaian positif ini. Sedangkan, tingkat keterangkutan sampah di Kota Mamuju merupakan yang terendah di Indonesia, yaitu hanya 2,82 persen dari total produksi sampah sebesar 7.383 meter kubik.

Permasalahan sampah tak hanya terkait dengan produksi maupun keterangkutannya, tapi masalah pemilahan terhadap jenis organik dan nonorganik. Manajemen pemilahan sampah akan menentukan pengelolaan sampah yang baik.

Secara umum, volume sampah organik yang terangkut per harinya lebih besar dibandingkan



anorganik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Di Jakarta, misalnya, pada 2016, tercatat 3.233,77 meter kubik sampah organik yang terangkut, sedangkan untuk anorganik hanya sebesar 2.748,90 meter kubik dan B3 sebesar 33,63 meter kubik.

Persoalan limbah B3 juga tak kalah pentingnya. Pada 2016, Kota Samarinda merupakan wilayah dengan volume keterangkutan B3 terbesar di Indonesia. Pada 2016, sampah B3 yang terangkut di kota itu mencapai 1.163,36 meter kubik, lebih besar dibandingkan organik (1.161,36 meter kubik) dan anorganik (840,89 meter kubik).

Dengan segala capaian plus dan minus di beberapa kota di Indonesia, apakah Indonesia

mampu mencapai target mengurangi sampah di lautan hingga 70 persen di 2025?

Jawabannya memang sangat kompleks karena banyak faktor. Permasalahan yang cukup signifikan soal penanggulangan sampah adalah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak di rumah tangga.

Masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Berdasarkan riset BPS, pada 2013 dan 2014, perilaku mengelola dan memilah sampah rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan dari 23,69 persen menjadi 18,84 persen. Kemudian perilaku tidak memilah sampah sebelum dibuang naik dari 76,31 persen pada 2013 menjadi 81,16 persen di 2014.

Maluku Utara merupakan provinsi yang paling tidak sadar dalam memilah sampah. Pada 2014, 91,82 persen rumah tangga menyatakan tidak memilah sampahnya sebelum dibuang. DKI Jakarta yang merupakan kota terpadat pun, kesadaran masyarakatnya untuk memilah sampah masih rendah, yang dapat ditunjukkan dengan 88,65 persen rumah tangga tidak melakukan pemilahan sampah.

Sedangkan, provinsi dengan rumah tangga yang sudah cukup sadar melakukan pemilahan sampah adalah Sulawesi Selatan. Sebanyak 31,88 persen rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan sampah dan 68,11 persen belum memilahsmpah.

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah ini akan berdampak pada sulitnya untuk melakukan daur ulang sampah atau B3 di Indonesia. Apalagi tantangan yang dihadapi dengan semakin bertambahnya penduduk di kota-kota besar dan aktivitas industri, produksi sampah juga makin meningkat dari tahun ke tahun.

Faktor-faktor itu juga akan mempengaruhi volume pengangkutan sampah. Tingkat tidak terangkutnya sampah yang rata-rata sekitar 70 hingga 80 persen membuat realisasi pengurangan 70 persen sampah di lautan pada 2025 bakal sulit dicapai. Pemecahan masalah ini bisa dimulai dari rumah tangga, termasuk individu-individu di dalamnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari tirto.id dan dapat dibaca pada tautan www.tirto.id/mengintip-kota-kota-gudang-sampah-di-indonesia-cE4o

Artikel

Pemkab Sintang Serious Lanjutkan KIAT Guru

"Saya sudah diskusikan dengan Kepala Bappeda agar program KIAT Guru masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019. Kami ingin tahun 2019 nanti lebih banyak lagi sekolah yang harus melaksanakan program KIAT Guru, karena hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sintang," ucap Ibu Yosepa Hasnah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2018 dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Senin 14 Mei 2018.



www.batukarinfo.com/kiat-guru/news/pemkab-sintang-serious-lanjutkan-kiat-guru

Menko Perekonomian Resmi Meluncurkan Sistem OSS



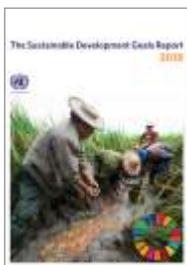
Pada hari ini, Senin (9/7) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun. "OSS yang pelaksanaannya diatur

dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian," kata Darmin Nasution. Dengan sistem OSS, imbuh Darmin, "Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam."

www.batukarinfo.com/komunitas/articles/menko-perekonomian-resmi-meluncurkan-sistem-oss

Referensi

The Sustainable Development Goals Report 2018



The Sustainable Development Goals Report 2018 highlights progress being made in many areas of the 2030 Agenda. Since the turn of the century, the maternal mortality ratio in sub-Saharan Africa has declined by 35 per cent and the under-five mortality rate has dropped by 50 per cent. In South Asia, a girl's risk of marrying in childhood has declined by over 40 per cent. And, in the least developed countries, the proportion of the people with access to electricity has more than doubled. Globally, labour productivity has increased and unemployment rate decreased. More than 100 countries have sustainable consumption and production policies and initiatives.

www.batukarinfo.com/referensi/sustainable-development-goals-report-2018



Antologi Kasus Kebijakan (Kumpulan Studi Kasus Kebijakan Publik di Indonesia)

EDITOR Agit Kristiana dan Ike Yuliami

Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA), bersama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dan TEMPO Institute telah menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Studi Kasus dan menghasilkan delapan studi kasus. Antologi ini memuat berbagai tulisan terkait studi kasus tersebut yang dapat digunakan dalam berbagai Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi.



Bola, Takdir, dan Luka (Buku Pertama)

PENULIS Willy Kumurur

Sepak bola merupakan olahraga yang banyak digemari oleh banyak kalangan, tidak terkecuali oleh seorang dokter bernama Willy Kumurur. Menjadi penggemar sepak bola dan senang menulis, Willy menggambarkan keseruan setiap perlehtatan akbar dari Liga Champion, El Clasico hingga Premiere League dengan tutur bahasa layaknya seorang filsuf dalam buku ini.



Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender

PENULIS Lusya Palulungan dkk

DPRD memiliki fungsi membentuk Perda dengan proses mulai dari menginisiasi, memproses, membahas hingga mengesahkan. Namun selama ini DPRD hanya menjalankan fungsi membahas dan mengesahkan Perda. Menginisiasi pembentukan Perda memang tidak mudah. Ada banyak faktor penghambat, salah satunya adalah kapasitas anggota DPRD dalam bidang legal drafting. Untuk itu, Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Program MAMPU menyusun panduan dalam mengembangkan model peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bidang legal drafting yang disertai dengan praktik pembentukan Perda.



Jurnal Perempuan: Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

PENERBIT Yayasan Jurnal Perempuan

Awal tahun 2018 Rancangan Undang-Undang KUHP telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada tahun 1963. Namun dalam konteks pembahasan tersebut disinyalir mengabaikan suara, pengalaman dan kepentingan perempuan dan kelompok marjinal. Jurnal edisi ini memuat kajian dan penelitian yang memperlihatkan beberapa persoalan penting dalam praktik KUHP dimana KUHP gagal melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender.